



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
(Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kota Solok)**

Oleh :

**DIKA FEBRINA**  
**05 953 044**

Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Akuntansi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat - Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG  
2010**



No. Alumni Universitas

DIKA FEBRINA

No. Alumni Fakultas

**BIODATA**

a). Tempat/Tgl lahir: Payakumbuh, 17 Februari 1987 b). Nama Orang Tua: Drs.H. Rafatli, MPd dan Hj.Delisia Siswanti c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No.Bp: 05 953 044 f). Tgl Lulus: 13 Februari 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 2,99 i). Lama Studi: 4 tahun 6 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Tan Malaka No.16 Tarok, Payakumbuh.

**AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

**(Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kota Solok)**

SKRIPSI SI Oleh **Dika Febrina**, Pembimbing: **Drs. Suhandi MSi, Ak.**

**Abstrak**

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Oleh sebab itu pemerintah telah mencanangkan program Wajib Belajar 9 Tahun bagi setiap warga negaranya. Untuk mensukseskan program tersebut, maka pemerintah memberikan bantuan kepada siswa setingkat SD dan SMP (negeri dan swasta) berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tim Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan Kota Solok selaku penyalur Dana BOS diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Dana BOS agar tepat sasaran. Untuk itu perlu dilakukan suatu evaluasi atau pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS, agar dapat diketahui kendala yang selama ini mengganggu kinerja Tim Manajemen BOS. Audit operasional merupakan salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Karena tujuan audit ini adalah untuk menilai kegiatan melalui pengungkapan kekurangan atau kelemahan sehingga dapat diberikan suatu rekomendasi perbaikan.

**Keyword** : audit operasional, pengelolaan dana, efektif, efisien

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 13 Februari 2010, telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	<b>Dra. Sri Daryanti Zen, MBA, Ak</b>	<b>Dra. Riza Reni Yanti, M.Si, Ak</b>	<b>Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak</b>

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi :

**Dr. Yuskar, SE, MA, AK.**  
NIP 131 629 305

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004 – 2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan terhadap pendidikan dasar yang ada di Indonesia.

Salah satu faktor yang memperparah sulitnya masyarakat Indonesia mendapatkan fasilitas dan layanan pendidikan adalah dikarenakan naiknya ongkos pendidikan akibat kenaikan harga BBM yang selalu berfluktuasi beberapa tahun terakhir ini. Hal ini juga diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya yang mengakibatkan turunnya kemampuan daya beli penduduk miskin, termasuk daya dalam pembelian produk-produk pendidikan. Kondisi seperti ini lambat laun akan menghambat kebijakan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Berdasarkan kebijakan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, maka dikeluarkanlah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7- 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Berdasarkan undang – undang

tersebut maka pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada warga negaranya dalam bidang pendidikan yaitu seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar ( SD/MI dan SMP/ MTs serta satuan pendidikan yang sederajat.

Secara kumulatif jumlah siswa putus sekolah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mencapai 1,39 Juta untuk jenjang SD/MI , 535.700 untuk jenjang SMP/MTs dan 352.600 untuk jenjang SMA/SMK/MA. Disparitas partisipasi sekolah juga masih cukup tinggi antar kelompok masyarakat. Salah satu kesenjangan terbesar adalah antara partisipasi pendidikan penduduk kaya dengan penduduk miskin. Sebagai gambaran , pada saat rata- rata Angka Partisipasi Kasar (APK ) jenjang SMP/MTs sebesar 81,08 persen, sementara APK kelompok terkaya telah mencapai 99,51 persen, sementara APK kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen ( *Departemen Pendidikan Nasional, 2005* ). Keadaan tersebut tentu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sekaligus untuk mencapai sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun yang antara lain diukur dengan tercapainya APK jenjang SMP/MTs sebesar 95 persen pada tahun 2008, serta untuk mencapai sasaran - sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti *Education For All (EFA)* dan *Millenium Development Goals (MDGs)* yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, laki- laki dan perempuan dimanapun, minimal sampai jenjang pendidikan dasar.

Untuk menentukan apakah kebijakan pemerintah ini sukses atau tidak maka Program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk tahun 2005, APK tingkat SMP sebesar 85,22 % dan pada akhir tahun 2006 telah mencapai 88,68% dimana target penuntasan Program Pendidikan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai audit operasional pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Kota Solok maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana BOS pada Dinas Pendidikan Kota Solok belum sepenuhnya efektif. Hal ini bisa dilihat dari anggaran yang telah ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS tidak sesuai dengan realisasinya. Untuk SD telah direalisasikan sebesar 98,2% dan untuk SMP sebesar 69,6%.
2. Masih banyak sekolah yang terlambat dalam menyampaikan SPJ sebagai bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOS.
3. Pengendalian manajemen yang masih lemah dalam menyikapi keterlambatan pemberian SPJ.
4. Masih banyak sekolah yang tidak memajang papan RAPBS sehingga bukti transparansi masih kurang.
5. Masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga administrasi dan bendahara yang khusus menangani BOS.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Solok (Tim Manajemen BOS) periode Januari- Maret 2009, maka penulis dapat memberikan beberapa saran/ rekomendasi sebagai berikut :

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. **Auditing (Pemeriksaan Akuntan)** oleh Kantor Akuntan Publik, Edisi Ketiga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2004.
- Arens , Alvin A and James K. Loebbecke. **Auditing an Intergrated Approach** . Seventh Edition Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice Hall Inc. 1997.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, **UU No.1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.**
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, **UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.**
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. **Kode Etik dan Standar Audit.** Edisi Kelima . Bogor, 2008.
- Budiman, Yenni. **Penerapan Audit Operasional atas Fungsi Produksi Untuk Mengetahui Faktor- Faktor Penyebab Produk Cacat Pada PT. Halimjaya Sakti di Gempol.** Surabaya. 2002.
- Bhuvana, George Agung. **“Penerapan Audit Operaional Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Fungsi Produksi Pada PT, Graha Cendana”.** Surabaya. 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. **“Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS buku Dalam RangkaWajib Belajar 9 Tahun”.** Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. **“Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu”.** Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 2009.
- Evalina, Fitri. **“Pengaruh Program Bantuan Operasional sekolah terhadap Biaya Pendidikan Yang dikeluarkan Orang Tua Siswa pada SMPN di Kecamatan Batipuh”.** Padang. 2008.
- Hadiz, Liza..**“Pelaksanaan Program Bantuan Operasioanl (BOS) 2005”.** [www.Smeru.or.id](http://www.Smeru.or.id). 2006.
- Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) STAN. **Petunjuk Pemeriksaan Operasional.** Jakarta: PPA STAN, 1984.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, **UU No.23 Tahun 2007 Tentang Pedoman tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**